
Gerakan Emansipasi Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Jawa Barat Pada Awal Abad Kedua Puluh

Andrea Dinurul Aeni ^{a, 1 *}, Miftahul Habib Fachruruzi^{b, 2}

^{a b} Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

¹ 202171021@student.unsil.ac.id; ² miftahul.habib@unsil.ac.id

* Corresponding author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap gerakan emansipasi perempuan di Jawa Barat serta peranan tokoh-tokoh yang menonjol dalam gerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan emansipasi perempuan dalam bidang pendidikan di Jawa Barat (1904-1948) dilatarbelakangi oleh adanya politik etis, dan keadaan kaum perempuan di abad ke-19 yang mengkhawatirkan. Selain itu kaum perempuan sering dianggap lemah dan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti halnya kaum pria. Ketidakadilan inilah yang membuat tokoh-tokoh perempuan berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kesetaraan harkat perempuan dengan laki-laki, serta kebebasan untuk memilih dan mengelola kehidupannya, terutama dalam hal pendidikan. Muncullah gerakan emansipasi perempuan yang dianggap sebagai momentum untuk memperjuangkan hak mereka. Tokoh yang memelopori gerakan emansipasi perempuan dalam bidang pendidikan di Jawa Barat salah satunya Dewi Sartika dan Raden Ayu Lasminingrat. Dewi Sartika yang berjuang untuk memberikan pendidikan yang layak bagi kaum perempuan dengan mendirikan *Sakola Istri* di Bandung pada tahun 1904. Perjuangan yang tidak mudah bagi Dewi Sartika dalam mendirikan sekolah Istri. Perjuangan Dewi Sartika di ikuti oleh Raden Ayu Lasminingrat di Garut untuk mendobrak pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa seorang perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan membuahkan hasil yang bagus.

Kata Kunci: Emansipasi Perempuan, Pendidikan, Jawa Barat, Dewi Sartika, Raden Ayu Lasminingrat

Abstract

This study aims to reveal the women's emancipation movement in West Java and the role of prominent figures in the movement. This study uses historical research methods according to Kuntowijoyo. The results of this study indicate that the women's emancipation movement in the field of education in West Java (1904-1948) was motivated by ethical politics, and the worrying condition of women in the 19th century. In addition, women are often considered weak and unable to do work as well as men. It is this injustice that makes female figures fight desperately to fight for the equality of women's dignity with men, as well as the freedom to choose and manage their lives, especially in terms of education. The women's emancipation movement emerged which was considered a momentum to fight for their rights. The figures who pioneered the women's emancipation movement in the field of education in West Java were Dewi Sartika and Raden Ayu Lasminingrat. Dewi Sartika who struggled to provide a proper education for women by establishing a Sakola Istri in Bandung in 1904. Dewi Sartika's struggle was not easy in establishing a Wife school. Dewi Sartika's struggle was followed by Raden Ayu Lasminingrat in Garut to break the society's view that women do not need to get an education and produce good results.

Keywords: Women Emancipation, Education, West Java, Dewi Sartika, Raden Ayu Lasminingrat

PENDAHULUAN

Politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer menjadi titik balik pelaksanaan pendidikan Barat di Hindia Belanda. Van Deventer merupakan orang yang pertama kali menyampaikan gagasan tentang hutang balas budi Belanda terhadap negara jajahannya, khususnya Hindia Belanda. Politik etis ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di negara jajahan Hindia Belanda. Namun pada kenyataannya politik etis ini tidak terlepas dari kepentingan kolonial. Belanda menginginkan bangsa bumiputra mencapai kemajuan, namun di sisi lain tetap berada di bawah naungan mereka. Politik etis sendiri diresmikan pada September 1901, ketika Ratu Wilhelmina yang menyampaikan pidatonya.

Kebijakan politik etis tidak terlepas dari keprihatinan sebagian orang Belanda terhadap kesejahteraan kaum bumiputra pada abad kesembilan belas. Buruknya kesejahteraan kaum bumiputra membuat mereka mengusulkan untuk memberikan pendidikan yang layak untuk kaum bumiputra. Dengan munculnya politik etis menjadi sebuah pintu bagi masyarakat pribumi untuk memperoleh pendidikan dan menjadi langkah awal dalam perjuangan pemuda Indonesia. Salah satu isi dari politik etis ini adalah memberikan pendidikan. Politik etis memang tidak sepenuhnya berhasil dalam hal pelaksanaannya. Kaum bumiputra tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam perumusan kebijakan sebagai upaya untuk memperbaiki taraf kehidupannya (Fachrurrozi, 2019). Politik etis nampak lebih sebagai alat bagi pemerintah kolonial untuk mempertahankan kekuasaannya di Hindia Belanda. Meskipun demikian, bukan berarti sepenuhnya kaum bumiputra bersikap pasif dan tidak berbuat sesuatu untuk kemajuan kaumnya.

Pendidikan di Hindia Belanda pada saat itu hanya terfokus pada pendidikan untuk kaum laki-laki. Kaum perempuan pada saat itu tidak mempunyai peranan penting dalam memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Dalam perjalanannya para perempuan selalu dipandang sebelah mata, dianggap lemah, tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena takdir dari perempuan hanyalah menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa mengurus dapur, melayani suami dan anak-anaknya. Peran tokoh perempuan dalam pergerakan di Indonesia sejatinya mereka menjadi peletak dasar untuk mendapatkan hak yang sama dalam berbagai bidang kehidupan (Pradita, 2020). Kaum perempuan sejatinya mampu mendapatkan haknya dalam mengenyam pendidikan. Hal tersebut terjadi pada saat yang bersamaan dengan perluasan pendidikan sebagai dampak kebijakan politik etis.

Emansipasi perempuan menjadi sebuah momentum kesadaran di kalangan perempuan Indonesia untuk maju. Gerakan emansipasi ini tidak terlepas dari ide-ide Feminisme. Feminisme dapat diartikan sebagai upaya untuk memperjuangkan kesetaraan harkat perempuan dengan laki-laki, serta kebebasan untuk memilih dan mengelola kehidupannya. Ide feminisme ini sesungguhnya sudah muncul di berbagai penjuru dunia, meskipun berbeda aliran. Sampai saat ini ada beberapa aliran feminisme yang dikenal, diantaranya: feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, dan sebagainya (Setyagama, 2014).

Sayangnya, pendidikan untuk kaum perempuan dianggap tidak penting, karena mereka menganggap perempuan sebagai pendamping suami dalam bergaul dengan para pejabat Belanda. Tugas perempuan sebagai penerima tamu, menyiapkan jamuan bagi tamu. Namun peran perempuan sebagai ibu yang mendidik keturunannya masih dianggap penting. Pendidikan bagi kaum perempuan masih belum mendapatkan perhatian lebih. Pada awal abad kedua puluh, di Jawa masih adanya diskriminasi gender dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai. Menurut Gouda dalam Yuniarti (2018) terdapat gejala perubahan kedudukan perempuan bumiputra setelah diberlakukannya politik etis. Menariknya, akses pendidikan bagi perempuan bumiputra justru diinisiasi oleh sekolah-sekolah swasta. Beberapa sekolah ini bahkan dibangun khusus untuk mempersiapkan para perempuan di Jawa sebagai ibu rumah tangga. Tujuan dari dibangunnya sekolah ini, untuk menciptakan perempuan yang terdidik meskipun kewajiban mereka sebagai istri dan ibu sesuai dengan kodrat masing-masing.

Di sisi lain, para perempuan inisiator gerakan emansipasi mulai bermunculan. R.A Kartini menjadi tokoh gerakan perempuan yang paling terkenal. Riset yang dilakukan oleh Sujati & Haq (2020) menyatakan bahwa pada masa itu, kultur di Jawa menempatkan kaum perempuan sebagai kaum yang mempunyai hak-hak sosial lebih sempit di bandingkan dengan laki-laki. Kartini kemudian menjadi inisiator gerakan perempuan untuk mendirikan sekolah sehingga bisa memperjuangkan hak-hak perempuan bumiputra. Kartini kemudian menjadi tokoh dominan dalam historiografi perempuan di Indonesia dan kadang kala justru meminggirkan peran tokoh perempuan lainnya. Di Jawa Barat misalnya, juga terdapat tokoh yang menjadi pelopor gerakan emansipasi perempuan yakni Dewi Sartika dan Raden Ayu Lasminingrat. Mereka mendirikan Sekolah Keutamaan Istri yang bertujuan untuk mencetak perempuan-perempuan yang terdidik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka artikel ini

akan mencoba menjelaskan gerakan emansipasi perempuan di Jawa Barat khususnya pada bidang Pendidikan yang diinisiasi oleh Dewi Sartika serta Raden Ayu Lasminingrat.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan metode penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo (Kuntowijoyo, 2013) bahwa tahapan dalam penelitian sejarah meliputi beberapa tahapan, diantaranya: (1) Pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber) (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan.

Pemilihan topik merupakan kegiatan yang dilakukan penulisan untuk menentukan topik apa yang akan dibahas, berdasarkan pendekatan intelektual dan emosional penulis. Dalam artikel ini penulis mengambil topik tentang gerakan perempuan di Jawa Barat karena memiliki kesesuaian dengan latar belakang personal penulis. Selain itu, penulis ingin membuktikan dan memperlihatkan bahwa seorang perempuan mampu melakukan suatu perubahan yang besar meskipun sering mendapatkan diskriminasi gender. Tahapan kedua adalah pengumpulan sumber, baik sumber sekunder maupun primer yang bisa menunjang jalannya penelitian. Dalam kajian ini penulis menggunakan sumber sekunder, berupa karya artikel ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Kemudian penulis juga menggunakan metode digital heuristik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tetap memperhatikan kredibilitas dari sumber. Kritik sumber merupakan proses atau tahapan untuk memastikan atau memvalidasi apakah sumber yang digunakan sesuai. Tahapan ini meliputi kritik intern dan ekstern. Kritik intern berguna untuk memastikan isi dari sumber yang digunakan relevan atau tidak. Kemudian kritik ekstern digunakan untuk memastikan tidak adanya perubahan dari sisi bentuk, bahan dan cetakan. Interpretasi merupakan tahap menafsirkan terhadap data yang sudah diverifikasi demi mendapatkan suatu fakta sejarah. Historiografi atau penulisan merupakan tahapan penulisan dan penyusunan seluruh data yang ada berdasarkan kaidah penulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemunculan Gerakan Emansipasi Perempuan di Hindia Belanda Pada Awal Abad Kedua Puluh

Kaum perempuan bumiputra di Hindia Belanda sebelum abad kedua puluh berada pada posisi yang sangat inferior bila dibandingkan dengan kaum laki-laki. Inferioritas kaum perempuan dalam masyarakat bisa disebabkan oleh beberapa hal. Budaya patriarki yang berkelindan dengan budaya feodal yang masih hidup pada saat itu menempatkan istri tak lebih sebagai pendamping seorang laki-laki dan mengubah kedudukannya dari subjek menjadi objek. Para perempuan juga kerap kali hanya dijadikan sebagai obyek untuk memperbaiki status keluarga melalui proses perjodohan. Para perempuan kerap kali dijodohkan oleh keluarganya dengan laki-laki yang tidak dikehendaknya dengan alasan menjaga harkat serta martabat keluarga. Ironisnya mereka kerap kali dinikahkan dalam usia yang masih belia. Pernikahan dini ini yang kemudian berdampak negatif karena kerap kali berujung pada berbagai

tekanan psikologis bagi perempuan, poligami, dan bahkan yang paling buruk adalah perceraian (Blackburn, 2004).

Diskriminasi bagi perempuan juga terlihat pada bidang pendidikan. Pendidikan bagi kaum bumiputra pada dasarnya sudah ada sejak sebelum politik etis diberlakukan. Usaha untuk menyelenggarakan pendidikan untuk kaum bumiputra sebenarnya telah dicetuskan sejak zaman Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada awal abad kesembilan belas. Kala itu Daendels menginstruksikan kepada bupati agar menyelenggarakan pendidikan bagi penduduk bumiputra dengan biaya sendiri. Instruksi tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi dan butuh waktu hingga puluhan tahun agar kebijakan tersebut dieksekusi secara lebih serius. Keseriusan pemerintah kolonial dalam menyelenggarakan pendidikan bagi kaum bumiputra baru terlihat pada tahun 1848 ketika mereka menyediakan anggaran sebesar 25.000 gulden untuk mendirikan sekolah-sekolah pemerintah (Nasution, 1983). Akses terhadap sekolah-sekolah tersebut masih terbatas bagi kaum elit semata. Tujuan pendirian sekolah-sekolah tersebut tidak lain untuk memenuhi kebutuhan pegawai birokrasi kolonial sehingga tidak mengherankan jika umumnya siswa sekolah pemerintah adalah anak laki-laki dari kalangan elit.

Di Jawa Barat sendiri, hal tersebut juga jamak terjadi. Kaum *Menak*-sebutan bagi kalangan bangsawan Sunda, merupakan satu-satunya kelas sosial yang mampu mengakses pendidikan Barat di abad kesembilan belas. Meskipun demikian, tidak semua *menak* bersedia menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Eropa dengan berbagai alasan. Antusiasme para *menak* untuk menyekolahkan anaknya mulai berangsur meningkat ketika pemerintah kolonial mulai membuka Sekolah Guru (*Kweekschool*) di Bandung pada tahun 1852, dan *Hoofdenschool* atau yang lebih dikenal sebagai *Sakola Menak* pada tahun 1878 (Lubis, 1998). Sayangnya, akses kaum *menak* terhadap pendidikan Barat tersebut juga masih didominasi oleh para laki-laki. Sebuah aturan yang bernada diskriminatif ditekan oleh Residen Priangan, C.P.C. Steinmetz pada tahun 1850-an yang menyatakan jika salah satu syarat bagi calon siswa di sekolah-sekolah pemerintah adalah anak laki-laki yang berumur 10-18 tahun (Horiyama, 2013). Alasannya, tak lain karena para lulusan sekolah tersebut kelak akan dipersiapkan sebagai calon pejabat dan pegawai birokrasi kolonial yang memang hampir seluruhnya diisi oleh para laki-laki. Para *menak* juga pada umumnya tidak menganggap penting pendidikan bagi kaum perempuan. Terlihat jelas jika baik Pemerintah Kolonial maupun para elite tradisional sama-sama memandang jika akses terhadap pendidikan hanya diperbolehkan oleh para laki-laki saja.

Menjelang peralihan abad kedua puluh, mulai terlihat jika kaum bumiputra di Hindia Belanda pada saat itu, baik dari kalangan bawah maupun elite membutuhkan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh. Perbaikan tersebut tidak hanya menasar kaum laki-laki saja, tapi para perempuan juga memerlukan perbaikan. Meskipun pada saat itu posisi perempuan masih disepelkan, karena peranannya sebagai seorang ibu dan istri jauh lebih dominan (Ohorella et al., 1992). Dengan adanya politik etis yang memberikan kesempatan pendidikan lebih luas bagi kaum bumiputra pada saat itu, maka hal tersebut menjadi momentum untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ternyata kebijakan dalam bidang

pendidikan membawa perubahan dalam diri masyarakat pada saat itu. Dimana adanya keinginan untuk menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan kedudukan serta persamaan kedudukan dalam masyarakat.

Di sisi lain, politik etis juga dibarengi dengan perubahan paradigma pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada awal abad kedua puluh juga menjadi momentum perluasan ide-ide demokrasi Barat yang diharapkan menjadi fondasi dari sebuah birokrasi negara kolonial yang lebih otonom dari Kerajaan Belanda (Locher-Scholten, 2000). Semangat demokratisasi tersebut, ditambah dengan aspirasi kemajuan yang menjadi semangat zaman politik etis kemudian mulai mempengaruhi pemikiran tokoh-tokoh elite dari kaum bumiputra. Hal tersebut tercermin dari beragam gagasan yang diadopsi oleh para tokoh elite bumiputra. Salah satu gagasan yang mulai diadopsi oleh beberapa tokoh, khususnya dari kalangan perempuan adalah Feminisme. Feminisme yang muncul di Hindia Belanda pada awal abad kedua puluh ini dapat dianggap sebagai bagian dari Feminisme Gelombang Pertama yang menyuarakan gagasan emansipasi perempuan untuk mendobrak berbagai batasan kultural dan dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan (Wieringa, 2007). Gagasan Emansipasi dalam Feminisme Gelombang Pertama ini kemudian bahkan menjadi inspirasi bagi perkembangan ide-ide awal Nasionalisme Indonesia yang juga bercorak emansipatoris.

Dari sinilah muncul gerakan-gerakan perempuan untuk memperjuangkan haknya terutama dalam mendapatkan pendidikan di awal abad kedua puluh. Memang harus diakui jika pendidikan yang layak pada saat itu hanya bisa dirasakan oleh kalangan bangsawan saja. Namun demikian, bukan berarti para tokoh perempuan tidak memberikan perhatian kepada rakyat biasa untuk mendapatkan akses pendidikan. R.A Kartini memang menjadi tokoh paling terkemuka yang dianggap sebagai inisiator gerakan emansipasi perempuan di Hindia Belanda. Usaha Kartini untuk keluar dari “sangkar emas” kehidupan perempuan *priyayi* untuk menggapai kemajuan dapat disandingkan dengan tokoh-tokoh feminis lain yang sezaman seperti Begum Rokeya Sakhawat Hossain dari Bangladesh atau Aletta Jacobs dari Belanda (Wieringa, 2007). Selain Kartini, terdapat beberapa tokoh emansipasi perempuan terkemuka yang berasal dari Jawa Barat yakni Dewi Sartika serta Raden Ayu Lasminingrat. Keduanya dikenal dalam memperjuangkan pendidikan perempuan bumiputra di tanah Priangan. Meskipun gerakan-gerakan tersebut masih bersifat perorangan, atau kadang kala dalam kelompok-kelompok yang terbatas, namun pada dasarnya semua mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kemajuan kaum perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi warisan penting bagi tokoh-tokoh tersebut untuk kemudian menjadi inspirasi bagi generasi muda maupun gerakan perempuan di masa-masa setelahnya.

Potret Pejuang Gerakan Emansipasi Perempuan Dalam Bidang Pendidikan di Jawa Barat Pada Awal Abad Kedua Puluh

1. Dewi Sartika dan Sekolah Untuk Perempuan Bumiputra

Raden Dewi Sartika lahir di Bandung, pada 04 Desember 1884, dan meninggal di Tasikmalaya pada tanggal 11 September 1947 (Hadi & Sutianingsih, 2015). Kedua orang tuanya berasal dari

keluarga *menak* yaitu Raden Ranga Somanagara dan Raden Ayu Rajapermas. Ayahnya merupakan seorang Patih di Bandung sementara ibunya merupakan putri Bupati Bandung R.A.A. Wiranatakusumah IV (Wiriaatmadja, 2009). Hal ini dengan jelas menunjukkan kedudukan Dewi Sartika sebagai seorang putri dari keluarga *menak* yang sangat terhormat. Oleh karena statusnya sebagai seorang *menak* pula, Dewi Sartika dapat mengakses pendidikan Barat. Ia saat itu bersekolah di *Europesche Lagere School* (ELS) yang setingkat SD. ELS sendiri sejatinya merupakan sekolah yang khusus dibuka untuk anak-anak Belanda. Pendidikannya di ELS tersebut menjadikannya salah seorang perempuan bumiputra generasi awal yang menempuh pendidikan Barat.

Masa kecil Dewi Sartika tidak bisa dibilang berjalan mulus. Pada usia 9 tahun, Ayahnya dituduh melakukan makar terhadap pejabat Bupati Bandung yang baru yakni R.A.A Martanagara. Sebagai konsekuensi dari tuduhan tersebut, Raden Somanagara terpaksa diasingkan ke Ternate, Maluku. Pembuangan yang dialami oleh ayahnya juga mempengaruhi kehidupan keluarga Dewi Sartika. Selepas kejadian itu, para kerabatnya mulai menjauhi keluarganya dan bahkan Dewi Sartika terpaksa dikeluarkan dari sekolahnya (Lubis, 1998). Hal tersebut tentu menghadirkan pengalaman yang traumatis dalam diri Dewi Sartika. Beruntung pamannya, Raden Demang Suria Kartahadiningrat yang saat itu menjabat sebagai Patih Cicalengka kemudian membawanya ke kediamannya dan mengajarnya pendidikan keterampilan bersama dengan putra-putrinya.

Pengalaman selama tinggal di Cicalengka ini yang nampaknya sangat mempengaruhi munculnya kesadaran emansipasi dalam diri Dewi Sartika. Pada masa itu, para *menak* lazim menitipkan anaknya ke keluarga yang berpangkat lebih tinggi untuk belajar sopan santun, dan etika sebagai seorang *menak* muda (Wiriaatmadja, 2009). Hal tersebut sepatutnya juga dialami oleh Dewi Sartika. Sayangnya, tidak semua kerabat mau menerima Dewi Sartika dengan tangan terbuka. Masih banyak keluarga dan kerabatnya yang kurang suka dengan kehadirannya yang disebabkan oleh kasus ayahnya dahulu. Oleh karena itu, selama di Cicalengka ia kerap kali mengalami diskriminasi dan bahkan tidak mendapat pendidikan baca-tulis maupun bahasa Belanda, melainkan hanya diperkenankan mengantarkan kerabatnya kepada seorang guru Belanda untuk belajar hal-hal tersebut. Dewi Sartika hanya diperkenankan mempelajari kegiatan keperempuanan semata seperti mengurus rumah dan sebagainya.

Dewi Sartika sejak awal merupakan seorang perempuan yang berpandangan egaliter. Ia tidak hanya berinteraksi dengan sesama *menak* saja melainkan juga dengan rakyat biasa atau yang biasa disebut *somah*. Selama waktu senggangnya, ia kerap kali bermain sekolah-sekolahan dengan para *somah* yang kebanyakan merupakan anak para pegawai di kantor Kepatihan Cicalengka (Lubis, 1998). Agaknya pengalaman diskriminatif yang dirasakannya membuatnya tertarik melakukan hal tersebut. Lambat laun, Dewi Sartika semakin sadar mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan agar tidak lagi hanya dianggap sebagai pelengkap kaum laki-laki saja.

Pada masa itu, para perempuan baik yang berasal dari kalangan *menak* maupun *somah* hampir seluruhnya belum mengenal pendidikan dan hanya mengikuti keinginan orang tua mereka, baik

dalam hal pendidikan, pernikahan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Keterbatasan dan kemerosotan para perempuan ini terutama dalam hal sosial yang membuat Dewi Sartika tergerak untuk melakukan perbaikan. Menurutnya pendidikan adalah hal yang bisa merubah dan memperbaiki nasib mereka. Dia selalu berpesan bahwa: "*Ieuh barudak, ari jadi awewe kudu segala bisa, ambeh bisa hirup!*" artinya: "Anak-anakku, sebagai perempuan kalian harus bisa dalam segala hal, agar bisa bertahan hidup!" (Wiriaatmadja, 2009). Semangat emansipasi bagi kaum perempuan ini kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata melalui bidang pendidikan.

Upaya Dewi Sartika untuk mewujudkan cita-citanya tersebut memang tidaklah mudah. Pada tahun 1902, ia memutuskan untuk meninggalkan Cicalengka untuk kembali ke Bandung. Dewi Sartika kemudian memberanikan diri menghadap Bupati Bandung, R.A.A. Martanegara dengan tujuan meminta izin untuk mendirikan sekolah bagi kaum perempuan. Pada awalnya R.A.A. Martanegara tidak menyetujui niat baik Dewi Sartika tersebut. R.A.A. Martanegara berkata:

"Entong, awewe mah entong sekola! Asal bisa nutu-ngejo, bisa kekerod, bisa ngawulaan salaki, ges lewih ti cukup, ganjaranna gem anjing sawarga. Komo ieu make rek dialajar basa Walanda segala"

(Jangan, perempuan tidak boleh sekolah! Sudah bisa masak, menjahit, mengurus suami itu lebih dari cukup, Pahalanya pun surga. Apalagi berkeinginan untuk mempelajari bahasa Belanda segala) (Wiriaatmadja, 2009).

Penolakan R.A.A. Martanegara dapat dipahami mengingat pada masa itu perempuan yang bersekolah merupakan hal yang sangat langka. Meskipun mendapat penolakan, Dewi Sartika tetap bersikukuh dengan cita-citanya tersebut. Baginya, emansipasi perempuan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Pada akhirnya, setelah melihat keteguhan hati Dewi Sartika, Bupati Martanegara kemudian mulai berubah pikiran. Ia akhirnya menyetujui usulan untuk mendirikan sekolah khusus kaum perempuan. Ia menyetujui pendirian sekolah perempuan tersebut dengan satu syarat yakni sekolah itu terlebih dahulu dibuka di Pendopo Kabupaten. R.A.A. Martanegara khawatir apabila keberadaan sekolah tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat (Wiriaatmadja, 2009). Meskipun dengan berbagai keterbatasan, pada akhirnya persetujuan dari Bupati Bandung ini merupakan sebuah dukungan besar bagi Dewi Sartika dalam upayanya memajukan kaum perempuan.

Pada 16 Januari 1904 didirikan "Sekolah Istri" untuk pertama kalinya di Indonesia, yang diselenggarakan di Paseban Kabupaten Bandung Barat. Sekolah Istri terdiri dari dua ruang kelas yang berisikan 20 orang murid. Dewi Sartika menjadi pengajar di sekolah tersebut. Selain Dewi Sartika tercatat nama Ibu Purma dan Ibu Uwit juga menjadi pengajar di Sekolah Istri (Wiriaatmadja, 2009). Adapun siswa yang belajar di sekolah ini merupakan perempuan dari keluarga biasa dan tidak terbatas dari kalangan *menak* saja. Prinsip yang dipegang oleh Dewi Sartika, bahwa sekolah yang didirikannya terbuka untuk siapapun yang membutuhkannya. Satu tahun berselang, Sekolah Istri berpindah ke jalan Ciguriang. Bangunan yang digunakan masih sederhana berbahan kayu dan bambu, dindingnya terbuat dari *seseg* (anyaman bambu). Pembelajaran di Sekolah Istri ini terfokus pada keterampilan perempuan. Dimana para gadis dididik untuk menjadi seorang istri yang utama.

Pokok pendidikan pada Sekolah Istri meliputi beberapa hal diantaranya: (1) belajar rumah tangga, mulai dari menyapu, mencuci, memasak. (2) mempelajari adat dan tata cara sesuai dengan kedudukan atau asal anak tersebut. Ketika berasal dari golongan *menak* maka harus diajarkan bagaimana menghadapi seseorang yang lebih tinggi, sederajat atau lebih rendah dari dia. (3) Di dapur, (4) Belajar merawat orang sakit, (5) Mempelajari ajaran agama. Pertambahan murid setiap tahun semakin bertambah, di tahun 1909 dilakukan perbaikan bangunan. Sekolah Istri semakin hari semakin mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.

Sekolah Istri kemudian berubah nama menjadi *Sakola Kautamaan Istri* pada tahun 1910 (Labibatussolihah et al., 2019). Pada saat itu, sekolah ini semakin berkembang dan mulai membuka cabang di berbagai kota seperti Ciamis, Bogor, dan Serang. Satu tahun berselang, jumlah murid *Sakola Kautamaan Istri* tercatat mencapai 210 orang. Jumlah ini tentu sangat luar biasa mengingat pada dekade sebelumnya, perempuan yang berpendidikan masih menjadi hal yang tabu di masyarakat. Pengaruh *Sakola Kautamaan Istri* bagi emansipasi perempuan di Jawa Barat sangatlah besar. Pada tahun-tahun setelahnya semakin banyak perempuan *menak* yang mengakses berbagai sekolah yang ada seperti HIS, ELS, MULO, dan bahkan HBS (Lubis, 1998). Hal tersebut tentu mustahil terwujud tanpa kehadiran Dewi Sartika yang menjadi pelopor dan penggagas emansipasi perempuan khususnya melalui jalan pendidikan.

Perjuangan Dewi Sartika dalam memperjuangkan kesetaraan gender di tengah masyarakat tradisional merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Emansipasi perempuan yang digagas oleh Dewi Sartika sesungguhnya didasarkan pada nilai kearifan lokal Sunda. Konsep pendidikan Dewi Sartika didasari dengan motto *cageur* (sehat), *baguer* (berkepribadian baik), *pinter* (cerdas), *wanter* (mandiri), dan *bener* (hidup di jalur yang benar) (Labibatussolihah et al., 2019). Bagi Dewi Sartika, seorang perempuan harus mampu menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung kepada laki-laki sebagaimana pandangan tradisional. Oleh karena itu, perempuan harus memiliki pendidikan yang baik sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Keyakinan inilah yang kemudian diwujudkan melalui *Sakola Kautamaan Istri*, dan lebih daripada itu, perjuangannya menginspirasi banyak perempuan lain tidak hanya dari tanah Priangan pada masanya melainkan juga perempuan dari berbagai daerah pada masa-masa setelahnya.

2. Raden Ayu Lasminingrat: Dari Dunia Kepenulisan Menuju Dunia Pendidikan

Raden Ayu Lasminingrat merupakan rekan seperjuangan Dewi Sartika dalam hal mewujudkan emansipasi perempuan di bidang pendidikan. Ia merupakan seorang *menak* yang juga menjadi istri bupati Garut pada awal abad kedua puluh yakni R.A.A. Wiratanudatar VIII. Raden Ayu Lasminingrat sendiri juga berasal dari keluarga *menak* yang sangat terhormat. Ayahnya adalah Raden Moehammad Moesa, seorang *hofdpanghulu* di Limbangan (Garut) yang sangat dihormati oleh masyarakat. Selain sebagai seorang *hofdpanghulu*, Moehammad Moesa juga dikenal sebagai sahabat karib K.F. Holle, seorang pengusaha Belanda yang juga dikenal sebagai tokoh berpengaruh dalam sejarah sastra Sunda (Horiyama, 2013). Persahabatannya dengan K.F. Holle sangat

mempengaruhi kehidupan keluarga Moehammad Moesa yang terbuka menerima pengaruh Barat dan modernitas. Latar belakang keluarga inilah yang kemudian membentuk pemikiran serta kepribadian Raden Ayu Lasminingrat.

Raden Ayu Lasminingrat tergolong sebagai perempuan yang berpikiran sangat maju pada zamannya meskipun pada kenyataannya ia tidak pernah menempuh pendidikan formal. Ia belajar membaca, menulis, serta pengetahuan umum lainnya-termasuk bahasa Belanda, di rumah seorang pejabat Belanda bernama Levyssohn Norman di Sumedang. Hubungan erat ayahnya dengan orang-orang Belanda agaknya membuat Raden Ayu Lasminingrat dengan mudah diterima di lingkungan orang-orang Belanda. Pengalamannya bergaul dengan orang-orang Belanda ini memberi pengaruh kuat mengenai pentingnya arti pendidikan termasuk bagi kaum perempuan. Pada tahun 1871. Ia bahkan sudah mampu menulis buku-buku pelajaran untuk anak-anak sekolah (Lubis, 1998). Kemampuannya menulis buku-buku tersebut menunjukkan betapa cerdas dan majunya pemikiran Raden Ayu Lasminingrat. Hal tersebut didasari pada fakta bahwa jumlah orang bumiputra yang menjadi pengarang masih sangat sedikit dan umumnya para pengarang itu adalah laki-laki.

Kemampuan Raden Ayu Lasminingrat sebagai seorang pengarang tidak dapat dipandang sebelah mata. Ia menerjemahkan sejumlah cerita dari Eropa ke dalam bahasa Sunda. Sejumlah karya terjemahannya yang cukup terkenal antara lain *Carita Erman*, *Warnasari atawa rupa-rupa dongeng* dan *Warnasari Jilid II* (Horiyama, 2013). Karya-karya tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Kolonial untuk disebarluaskan khususnya kepada siswa-siswa sekolah pemerintah di Jawa Barat. Karya-karya Raden Ayu Lasminingrat ini bahkan juga mengundang pujian dari K.F. Holle yang sangat terkejut dengan kemampuan seorang perempuan bumiputra dalam dunia kepenulisan. Sayangnya karir kepenulisannya harus berhenti ketika ia menikah dengan Raden Wiratanudatar VIII. Pada saat inilah Raden Ayu Lasminingrat mulai mencurahkan tenaganya untuk berjuang melalui dunia pendidikan, khususnya pendidikan bagi kaum perempuan.

Pada tahun-tahun awal abad kedua puluh, Raden Ayu Lasminingrat mendengar kabar usaha Dewi Sartika untuk membuka sekolah khusus bagi perempuan di Bandung. Mendengar bahwa Bupati Bandung menolak usulan Dewi Sartika, maka Raden Ayu Lasminingrat kemudian membujuk suaminya yang menjabat sebagai Bupati Garut untuk meyakinkan koleganya agar menerima ide pendirian sekolah itu (Harpiyah et al., 2018). Hasilnya R.A.A. Martanegara kemudian bersedia mendukung usulan Dewi Sartika, dan sejak tahun 1904 dibukalah sekolah khusus perempuan pertama di Jawa Barat. Disini nampak jelas jika baik Raden Ayu Lasminingrat dan Dewi Sartika saling dukung satu sama lain dalam mewujudkan emansipasi perempuan, khususnya pada bidang pendidikan.

Peran Raden Ayu Lasminingrat dalam mendirikan sekolah untuk perempuan tak terlepas dari pemikiran Dewi Sartika. Raden Ayu Lasminingrat berkeinginan agar para perempuan memiliki ilmu tentang berumah tangga untuk mendidik anak-anaknya. Karena pada kenyataannya pada saat itu sampai akhir abad ke-19 masih sedikit kaum perempuan yang mengenyam pendidikan. Menurut

Raden Ayu Lasminingrat bahwa pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari sanalah Raden Ayu Lasminingrat berusaha membuat terobosan baru dan menepis adat lama yang tidak mengizinkan kaum perempuan memperoleh pendidikan. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 1907 Raden Ayu Lasminingrat mendirikan “Sekolah Keutamaan Istri” dilingkungan pendopo Garut (Harpiah et al., 2018). Berbeda dengan Dewi Sartika yang mendapat kesulitan saat proses mendirikan sekolahnya, Raden Ayu Lasminingrat tidak mengalami kesulitan yang berarti. Hal ini disebabkan karena Raden Ayu Lasminingrat merupakan seorang istri bupati Garut, sehingga ia mendapatkan bantuan dari para petinggi lain yang berada di Garut. Kesulitan justru dialami saat mencari murid yang bersedia belajar di sekolah itu, meskipun kemudian masalah tersebut dapat teratasi.

Adapun kurikulum sekolah ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum milik sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika. Para murid di sekolah ini diajari berbagai keterampilan seperti menulis, membaca, merajut, membatik, hingga kerajinan tangan (Harpiah et al., 2018). *Sekolah Kautamaan Istri* di Garut ini kemudian lambat laun semakin diterima oleh masyarakat luas dan bahkan juga mendapatkan legalitas dari pemerintah kolonial. Pada dekade kedua abad kedua puluh, jumlah *Sekolah Kautamaan Istri* terus bertambah di berbagai daerah baik di wilayah Garut atau wilayah lain seperti Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta dan Rangkasbitung. Perluasan *Sekolah Kautamaan Istri* ini menyiratkan keberhasilan dari perjuangan emansipasi perempuan yang diusahakan oleh Raden Ayu Lasminingrat di tanah Priangan.

Perjuangan Raden Ayu Lasminingrat dan juga Dewi Sartika dalam memperluas akses pendidikan yang lebih luas bagi perempuan dapat dianggap sebagai bukti nyata kegigihan para pejuang emansipasi perempuan di Jawa Barat. Dalam perspektif yang lebih luas, emansipasi perempuan yang dicetuskan oleh kedua tokoh tersebut merupakan bagian dari pergerakan nasional yang mulai tumbuh pada dekade awal abad kedua puluh. Pendidikan bagi perempuan merupakan dasar untuk keterlibatan perempuan dalam ruang publik sebagai aktor sosial-politik yang aktif (Suwarta, 2009). Partisipasi perempuan dalam ruang publik-yang sebelumnya dimonopoli oleh para laki-laki, menunjukkan dengan jelas jika perlahan namun pasti emansipasi perempuan mulai terwujud. Hal tersebut tentu mustahil terwujud apabila pada pionir emansipasi perempuan seperti Raden Ayu Lasminingrat dan juga Dewi Sartika bersedia keluar dari zona nyamannya dan ikut serta dalam perjuangan memajukan kaumnya.

KESIMPULAN

Kemerosotan ekonomi sekitar abad ke-19 di Hindia Belanda terutama pulau Jawa berpengaruh terhadap posisi perempuan pada saat itu. Kemudian munculnya Politik Etis yang membawa perubahan dalam hal pendidikan. Meskipun tidak seluruhnya menguntungkan rakyat bumiputra, namun dengan adanya politik etis ini setidaknya bisa membawa angin segar bagi semangat emansipasi. Keadaan perempuan pada abad kesembilan belas yang mengkhawatirkan, tidak adanya kebebasan untuk

menentukan apa yang mereka inginkan. Muncullah gerakan emansipasi perempuan, yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan harkat perempuan dengan laki-laki, serta bisa mendapatkan kebebasan untuk mengelola kehidupannya. Gerakan emansipasi perempuan di Indonesia dipelopori oleh R.A Kartini, dan disusul oleh tokoh-tokoh lain seperti Dewi Sartika, Raden Ayu Lasminingrat yang berjuang dalam pendidikan.

Dewi Sartika tokoh perempuan yang memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan di Jawa Barat. Dia mendirikan *Sakola Istri* tahun 1904. Dimana perjuangan untuk mendirikan sekolah ini tidaklah mudah, usulannya sempat ditolak oleh Bupati Bandung pada saat itu, sampai akhirnya diperbolehkan mendirikan sekolah. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak yang kurang mampu dan ingin mendapatkan pendidikan untuk memperbaiki kehidupannya. Pelajaran yang diberikan di sekolah ini seperti memasak, mencuci, menyapu mengurus rumah tangga, karena tujuan dari sekolah ini adalah untuk mempersiapkan perempuan-perempuan yang berkompoten untuk mendidik anak dan mengurus rumah tangga.

Selain Dewi Sartika yang memperjuangkan pendidikan kaum perempuan, ternyata di Garut ada Raden Ayu Lasminingrat yang sama seperti Dewi Sartika berkeinginan untuk memajukan kaum perempuan. Perjalanan Raden Ayu Lasminingrat tidak sesulit Dewi Sartika dalam mendirikan sekolah, karena Raden Ayu Lasminingrat merupakan istri seorang Bupati Garut kala itu. Hambatan yang dihadapi Raden Ayu Lasminingrat ketika sudah mendirikan sekolah adalah kurangnya siswa yang mau belajar, karena masyarakat pada saat itu percaya bahwa seorang perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan. Namun akhirnya Raden Ayu Lasminingrat berhasil menghilangkan kepercayaan tersebut dan sekolah yang didirikannya berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Blackburn, Su. (2004). *Woman and State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Fachrurrozi, M. H. (2019). Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra. *Bihari*, 2(1), 13–25.
- Hadi, K., & Sutioningsih. (2015). *ENSIKLOPEDIA PAHLAWAN NASIONAL* (Qoni, Ed.). Istana Media.
- Harpiyah, D., Wardah, E. S., & Fauziah, S. (2018). PERAN RADEN AYU LASMININGRAT DALAM MENGEMBANGKAN SEKOLAH KEUTAMAAN ISTRI TAHUN 1907-1948. *Tsaqofah: Jurnal Agama Dan Budaya*, 16(2).
- Horiyama, M. (2013). *Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak, dan Kesusastraan Sunda Abad Ke-19*. Komunitas Bambu.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Labibatussolihah, Lestari, W. D., Azizah, L. N., Fitriani, hani, Fathiraini, N., & Adriani, N. M. (2019). The Values, Local Wisdom, and Heroism of Raden Dewi Sartika's Thoughts On Women

- Emancipation Through Education. *International Seminar on Social Studies and History Education*.
- Locher-Scholten, E. (2000). *Women and the Colonial State: Essays in Gender and Modernity in the Netherlands Indies 1900-1942*. Amsterdam University Press.
- Lubis, N. H. (1998). *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Nasution. (1983). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Penerbit Jemmars.
- Ohorella, G. A., Sutjiatiningsih, S., & Ibrahim, . Much taruddin. (1992). *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah nasional.
- Pradita, S. M. (2020). Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19 – 20: Tinjauan Historis Peran Perempuan dalam Pendidikan Bangsa. *CHRONOLOGIA*, 2(2), 12–27. <https://doi.org/10.22236/jhe.v2i2.6060>
- Setyagama, A. (2014). Beberapa Persepsi Tentang Perjuangan Emansipasi Wanita Ditinjau Dari Budaya dan Agama. *Jurnal Mimbar*, 1(1), 33–38.
- Sujati, B., & Haq, I. H. (2020). Gerakan Perempuan di Jawa (1912-1941). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2(1), 16–31. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i1.10>
- Suwirta, A. (2009). The History of Education in West Java, Indonesia: From Traditional Era Toward Modern Era. *EDUCARE: International Journal for Educational Studies*, 1(2).
- Wieringa, Saskia. E. (2007). Feminisme Transnasional, Pelajaran Gelombang Pertama. *Perempuan*, 52, 91–104.
- Wiriaatmadja, R. (2009). *Dewi Sartika*. Direktorat Nilai Sejarah.
- Yuniarti, E. S. (2018). Pendidikan Bagi Perempuan Jawa Pada Abad Ke 19. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 12(1), 30–38.